



Mendesaknya Peningkatan Alokasi Belanja untuk Dalkarhutla

ANCAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi populer ditahun 2015, ketika bencana asap tidak hanya mengancam kawasan sekitar lokasi kebakaran, namun pula membahayakan jiwa banyak orang secara nasional. Rawan dan sensitifnya hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap ancaman kebakaran, salah satunya diakibatkan oleh luasnya lahan gambut yang mencapai 1,5 juta hektar¹.

Pada tahun 2015 di Kalimantan Barat, luas kebakaran mencapai 167,7 ribu hektar². Kemampuan pemadaman hanya seluas 761,4 hektar (0,45%)³, meskipun akhirnya dapat terpadamkan seluas 166.929,6 hektar (99%) atas peran serta masyarakat.

Meskipun luas kebakaran dapat dilokalisir, namun akibat dari kebakaran tidak hanya dapat dituntaskan melalui pemadaman. Luasnya lahan gambut dan komposisi tanah di Kalimantan Barat mempengaruhi pada meluasnya

dampak yang diakibatkan oleh kebakaran. Akibatnya, selain pemadaman/ penanggulangan kebakaran, penting untuk mendorong adanya pencegahan kebakaran serta pemulihan paska kebakaran.

Setidaknya terdapat 2 SKPD ditingkat Provinsi Kalimantan Barat yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla), yaitu BPBD, Dinas Kehutanan, dan BLHD. Meskipun terdapat pelaku lain dalam penanganan, namun ketiga SKPD tersebut secara rutin dan diamanahkan oleh Peraturan Perundangan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

¹ Sumber data BPN dalam KDA Kalimantan Barat 2015

² Sumber data LAPAN 2015, dikutip oleh BPBD pada Presentasi 23 Februari 2016

³ Sumber data BKSDA 2015, dikutip oleh BPBD pada Presentasi 23 Februari 2016

BELANJA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

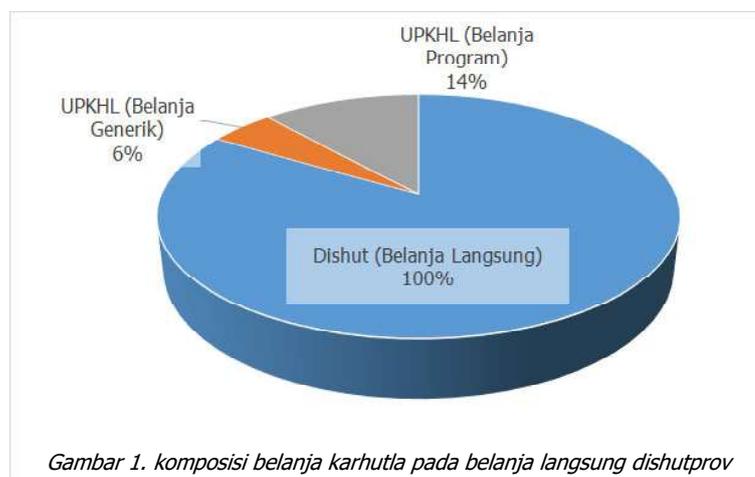
Penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi berada pada Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (UPKHL). Total biaya yang dialokasikan pada UPKHL pada 2016 sebesar 2,6 milyar.

Grafik komposisi belanja karhutla pada belanja langsung dishutprov

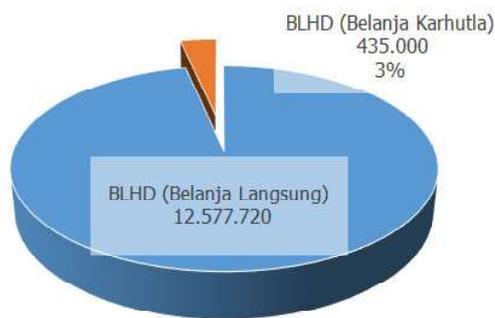
Pada grafik diatas, dapat terlihat bahwa alokasi belanja yang diperuntukkan pada UPKHL sebesar 20% dari Total Belanja Langsung Dishut Provinsi. Dari 20% tersebut, sebesar 1.847.008.000 diperuntukkan bagi belanja program ataupun belanja untuk pengendalian karhutla.

Grafik komposisi belanja karhutla pada belanja langsung BLHD

Sedangkan pada BLHD, alokasi belanja yang diperuntukkan bagi dalkarhutla sebesar



Gambar 1. komposisi belanja karhutla pada belanja langsung dishutprov



Gambar 2. komposisi belanja karhutla pada belanja langsung BLHD

435 juta (3% dari total belanja langsung BLHD). Sehingga total biaya yang dialokasikan untuk dalkarhutla pada tahun 2016 sebesar 2,2 milyar.

Sebagian besar belanja tersebut dialokasikan untuk melakukan pencegahan yang dilakukan melalui 3 saluran, yaitu penanganan langsung (peningkatan kapasitas internal dan pengumpulan data), keterlibatan masyarakat (sosialisasi, kampanye), dan keterlibatan SKPD lain (koordinasi). Sedangkan aktivitas pemadaman mendapat porsi 11% dari total belanja karhutla. Komposisi alokasi belanja penanganan Karhutla dapat dilihat pada lampiran 1.

EFISIENSI TENAGA PENGAMAN HUTAN

Jumlah total POLHUT dan PPNS di Kalimantan Barat (termasuk tenaga di Kabupaten), berdasarkan Statistik Kehutanan Kalbar 2014 sebanyak 158 orang, dengan komposisi 43 PPNS dan 115 Polhut. Jumlah tersebut diharuskan mengamankan seluruh kawasan hutan seluas 8.389.601. Jika mengacu pada data tersebut, maka rasio antara tenaga pengamanan dan luas kawasan yang diamankan adalah **1:52 ribu hektar**⁴. Logikanya 1 orang tenaga pengamanan diharuskan mengamankan lebih dari 52 ribu hektar. Sedikitnya jumlah tenaga pengamanan, jika dibandingkan dengan luas kawasan yang harus diamankan tidak secara otomatis harus menambah tenaga pengamanan. Hal ini berakibat pada membengkaknya jumlah belanja tidak langsung yang belum tentu dapat dimanfaatkan secara efektif.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, strategi pengendalian karhutla yang dilakukan Pemprov menyasar pada tiga hal yaitu penguatan internal, penguatan masyarakat, dan koordinasi. Permasalahannya adalah total belanja yang dialokasikan untuk pengamanan hutan sangat terbatas.

Belanja karhutla 2016 sebesar 2,28 milyar diharuskan untuk mengamankan seluruh kawasan hutan. Sehingga biaya yang dialokasikan untuk pengamanan **per hektar hanya sebesar Rp. 242**⁵. Beranjak dari terbatasnya belanja yang dialokasikan, maka UPKHL hanya dapat menangani Karhutla di Kota Pontianak dan sekitarnya⁶. Sedangkan untuk penanganan di wilayah lain, mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten.

Permasalahannya, sejak terbitnya Peraturan Menteri

**"1 orang
diharuskan untuk
melakukan
pengawasan
seluas 82.388
hektar"**

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 mengamanahkan Gubernur untuk **melakukan pengawasan terhadap dalkarhutla pada (1) izin pemanfaatan hutan, (2) izin pinjam pakai kawasan hutan, (3) Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Hak dan Kawasan Hutan untuk tujuan khusus**⁷. Kewenangan pengawasan tersebut membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit.

Jika tetap mempertahankan pola saat ini, dengan jumlah personil sebanyak 33 orang (Polhut dan PPNS) pada Dishutprov, maka **1 orang** diharuskan untuk melakukan pengawasan seluas

82.388 hektar (kawasan pengawasan Dishutprov dan Jumlah Tenaga dapat dilihat pada lampiran 2). Untuk mengoptimalkan sumberdaya terhadap dalkarhutla yang ada, maka alokasi belanja sebesar 2.28 milyar ditahun 2016 pun tidak dapat dinilai cukup. Jika mengacu pada belanja dalkarhutla 2016, maka **pengendalian per hektar** hanya sebesar **Rp. 839**⁸.

⁴ Diperoleh melalui pembagian antara jumlah tenaga pengamanan dan luas kawasan hutan

⁵ Diperoleh melalui pembagian antara total belanja karhutla 2016 dengan luas kawasan hutan

⁶ Sumber hasil wawancara dengan Dishutprov Kalbar

⁷ Peraturan Menteri LH dan Kehutanan No. P.32 /MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan pasal 106

⁸ Diperoleh melalui pembagian antara belanja dalkarhutla dengan wilayah kewenangan provinsi

MELACAK BELANJA MINIMAL PADA DALKARHUTLA

Belum ada riset tentang standar pengendalian kebakaran hutan dan lahan per hektar. Sehingga untuk melacak jumlah ideal yang dibutuhkan dalam dalkarhutla per hektar, digunakan jumlah Polhut+PPNS pada Dishutprov dengan jumlah tutupan hutan di Kota Pontianak. Pertimbangan menggunakan jumlah tutupan hutan di Kota Pontianak, mengacu pada hasil wawancara dengan pihak Dishutprov bahwa kemampuan pengamanan hanya sebatas kawasan Pontianak dan sekitarnya. Dikarenakan belum teridentifikasi radius pengamanan hutan pada daerah sekitar kota

Pontianak, data yang digunakan adalah Kalbar Dalam Angka 2015 yang menunjukkan bahwa seluas 858 hektar dikategorikan sebagai Hutan Belukar di Kota Pontianak. Jika luas kawasan yang diamankan pun menjangkau kawasan disekitar Kota Pontianak, maka diasumsikan luas wilayah yang diamankan seluas 50% dari hutan belukar di Kota Pontianak. Sehingga total luas kawasan yang diamankan oleh Dishutprov adalah seluas 1287 hektar.

Beranjak dari angka tersebut, rasio minimal terhadap tenaga pengamanan adalah **1 orang dianggap mampu**

Belanja minimal yang dibutuhkan untuk pengamanan langsung (pencegahan) adalah sebesar Rp. 13.730 per hektar

mengamankan 39 hektar. Sedangkan belanja yang diperuntukkan pada kegiatan pengamanan adalah kegiatan "Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan" sebesar Rp. 17,6juta⁹. Mengacu pada angka tersebut, maka belanja minimal pengamanan langsung (pencegahan) adalah sebesar **Rp. 13.730 per hektar**¹⁰.

Ketika Peraturan Menteri LH dan Kehutanan No. P.32/MenLHK/

Setjen/Kum.1/3/2016 mengharuskan gubernur untuk melakukan pengawasan pada 5 kawasan tertentu, maka jumlah yang diamankan selama ini (kota pontianak dan sekitarnya) hanya sebesar 0,05% dari total kawasan yang seharusnya dapat diawasi. Akibatnya, untuk dapat mengawasi kawasan seluas 2.718.811 hektar, dibutuhkan biaya minimal sebesar **Rp. 37,3 milyar**¹¹.

⁹ Angka yang ditampilkan mengabaikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan patroli, serta upaya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana

¹⁰ Diperoleh melalui pembagian antara total belanja pengamanan secara langsung (Rp. 17.670.000) dengan kawasan hutan yang diamankan di Kota Pontianak dan sekitarnya (1.287 Hektar)

¹¹ Hasil diperoleh melalui perkalian antara belanja minimal pengamanan per hektar (Rp. 13.730) dengan total kawasan yang harus diawasi berdasarkan Peraturan Menteri LH dan Kehutanan No. P.32 /MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (2.718.811 hektar)

PENANGANAN PASCA BENCANA DIABAIKAN

Dari keseluruhan kegiatan yang ada pada BLHD dan UPKHL dalam hal kebakaran hutan, tidak ada yang mengalokasikan belanja dalam penanganan pasca karhutla. Padahal, jika mengacu pada data sebelumnya, keterbatasan belanja untuk pencegahan dan pemadaman berakibat pada besarnya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya terdapat 5 kegiatan yang dikategorikan sebagai aktivitas penanganan pasca kebakaran, yaitu (1) pengumpulan bahan, keterangan, dan informasi, (2) identifikasi, (3) rehabilitasi, (4) penegakan hukum, dan (5) monitoring dan evaluasi¹².

Hal ini perlu disikapi secara serius, mengingat kasus kebakaran hutan di Kalimantan Barat merupakan kejadian rutin tahunan. Data BPBD menunjukkan luas lahan yang terbakar sebesar 167,7 ribu hektar. Angka tersebut hanya merupakan akumulasi dari kasus kebakaran besar. Padahal pada beberapa titik, meskipun kebakaran dapat segera ditanggulangi dan luas yang terbakar relatif kecil, tidak terakomodir pada data BPBD. Hasil digitasi hotspot firms modis 2015 pun menunjukkan adanya titik api pada kawasan diluar data yang dirilis oleh BPBD. Sehingga, jumlah sebesar 167,7

ribu hektar memungkinkan mengalami penambahan. Akibatnya, perlu adanya penanganan pasca bencana yang berakibat pada rusaknya ekosistem dan menurunnya fungsi kawasan pada hutan dan lahan yang terbakar.

Banyaknya titik api dan luasnya lahan yang terbakar, salah satunya diakibatkan rendahnya belanja pengendalian. Jika mengacu pada Inpres No. 11 tahun 2015, koordinator dalam dalkarhutla adalah BPBD. Permasalahannya, pada kegiatan BPBD tidak secara spesifik menegaskan aktivitas tahunan yang dilakukan adalah dalkarhutla. Meskipun terdapat program "Rehabilitasi dan Rekonstruksi" pada BPBD, namun kegiatan yang terangkum pada program tersebut adalah penanganan pasca bencana. Mengingat bencana di Kalimantan Barat tidak hanya berada pada kebakaran hutan dan lahan, maka alokasi belanja tahunan pada program tersebut tidak dapat dirumuskan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penanganan pasca kebakaran.

¹² Perdirjen PHKA No. P.23/IV-SET/2014 pasal 3

:: REKOMENDASI ::

- 1. Perlunya rumusan ulang dalam Dalkarhutla dengan melibatkan SKPD terkait dalkarhutla seperti BLHD dan UPKHL pada Komando dan Satgas Dalkarhutla¹³.**
- 2. Perlunya penambahan alokasi belanja untuk pelaksanaan patroli dalam pencegahan sebesar 37,3 milyar pertahun.**
- 3. Perlunya alokasi belanja untuk penanganan pasca kebakaran per tahun yang mengacu pada kebakaran yang terjadi ditahun sebelumnya**

¹³ Keputusan gubernur No. 124/BPBD/2016 tentang Pembentukan Komando Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat tidak melibatkan BLHD dan UPKHL

Lampiran 1. Komposisi Belanja Pengendalian Karhutla pada Pemprov Kalbar 2016 (dalam ribu rupiah)

Masyarakat		Langsung		Koordinasi dng SKPD Lain		Total
Nama Kegiatan	Indikator	Belanja 2016	Nama Kegiatan	Indikator	Belanja 2016	
Pencegahan (UPKHL)						
		506.743,5			972.497	1.540.515,5
Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Tersedia, terpasang dan terdistribusikannya bahan kampanye pencegahan karhutla	70.433	Kegiatan Latihan Rutin Pengendalian Karhutla	Meningkatnya kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam dalkarhutla	36.400	61.275
Kegiatan Pelatihan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Gulkarhutla	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya pengendalian karhutla	149.969	Kegiatan Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan (Dalam Kota Pontianak)	Informasi lokasi dan kejadian kebakaran hutan dan lahan tersedia dengan akurat	17.670	
Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api (mpa)	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya pengendalian karhutla	96.782	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan/diminimalisir	769.175	
Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan pengendalian karhutla	189.559	Kegiatan Pemeriksaan Titik Api	Informasi titik api tersedia dan akurat	62.181	
			Kegiatan Posko Pengendalian Karhutla	Informasi hotspot tersedia dan terdistribusi	23.984	
			inventarisasi potensi sumberdaya penanggulangan karhutla di IUPHHK/HA/HT	Teridentifikasi Sumberdaya Penanggulangan Karhutla dan peran serta pemegang IUPHHK/HA/HT dalam upaya Dalkarhutla	63.087	
		225.000			822.985	1.047.985
Pencegahan (BLHD)						
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Antisipasi Dampak Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan	meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi kebakaran hutan dan lahan.	225.000	Kegiatan Koordinasi Dan Antisipasi Kebakaran Hutan Dan Lahan	Pendeteksian dini sebaran hotspot di wilayah Kalimantan barat dilakukan melalui satelit NOAA 18 dan pemantauan hot spot (groundcheck) yang dilakukan ke lokasi sebaran	210.000	
					306.492,5	306.492,5
Pemadaman (UPKHL)						
			Kegiatan Operasional Pengendalian Dan Lahan Ke Kab./Kota	Kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan/diminimalisir	306.492.500	
TOTAL BELANJA PENGENDALIAN KARHUTLA						2.882.008

Lampiran 2. Kawasan Perlindungan terhadap Karhutla pada Dishutprov Kalbar

Wilayah Proteksi Dalkarhutla Dishutprov (Ha)	2.718.811
HPH/IUPHHK-HA	1.149.535
Pinjam Pakai Kawasan	11.890
Tukar Menukar Kawasan	337.688
Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan	422.342
IUPHHK-HT	781.415
HPHD	7.040
IUPHKm	8.900
Jumlah Tenaga Pengaman	33
PPNS	14
Polhut	19
Luas kawasan yang diamankan per orang (Ha)	82.388

Sumber: Statistik Kehutanan Kalimantan Barat 2014, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

